

Peran Thailand sebagai Node Utama dalam Pemberantasan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara

**Anisa Sundari
Honest Dody Molasy
Adhiningasih Prabhawati**

*Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember*

e-mail: anisaichao930@gmail.com

ABSTRACT

Transnational crime, particularly human trafficking, continues to evolve and constitutes a major challenge to human security and regional governance in Southeast Asia. Although ASEAN has adopted the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), regional implementation remains uneven and fragmented. This study examines why Thailand plays a strategic role as a key actor in regional efforts to reduce human trafficking. Using a qualitative descriptive-analytical approach, this research draws on academic literature and reports from international organizations. This study employs nodal governance theory to explain Thailand's economic, institutional, and positional capacities within Southeast Asia's security dynamics. The findings show that Thailand's strategic role is shaped by three main factors: its geographical position as a regional transit hub, its relatively strong economy that attracts large-scale labor migration, and Thailand's legal and institutional capacity as a basis for regional policies. The study concludes that Thailand's involvement is crucial, as regional anti-trafficking efforts are likely to face significant limitations without its active participation.

Keywords: *human trafficking, Thailand, ASEAN, labor migrations, transnational crime*

Kejahatan transnasional, khususnya perdagangan manusia, terus berkembang dan menjadi tantangan serius bagi keamanan manusia serta tata kelola regional di Asia Tenggara. Meskipun ASEAN telah mengadopsi kerangka normatif seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), implementasi kebijakan anti-perdagangan manusia di kawasan masih berlangsung tidak merata dan cenderung terfragmentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Thailand sebagai node utama dalam upaya menurunkan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur melalui artikel jurnal dan laporan organisasi internasional. Kerangka analisis yang digunakan yaitu teori nodal governance untuk menjelaskan posisi geografis, kapasitas ekonomi, dan kelembagaan Thailand sebagai node utama dalam penanganan perdagangan manusia regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran strategis Thailand ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu posisi geografis sebagai hub transit regional, kekuatan ekonomi yang mendorong migrasi tenaga kerja dalam skala besar, dan kapasitas hukum dan kelembagaan Thailand sebagai fondasi kepemimpinan kebijakan regional. Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan aktif Thailand menjadi elemen krusial dalam efektivitas pemberantasan perdagangan manusia di kawasan.

Kata Kunci: *perdagangan manusia, Thailand, Asia Tenggara, ASEAN, migrasi tenaga kerja, kejahatan transnasional*

Pendahuluan

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional yang kompleks. Kejahatan tersebut menjadi ancaman yang serius bagi stabilitas negara, sosial, ekonomi, dan keamanan di seluruh dunia. Menurut PBB (Persatuan Bangsa – Bangsa) perdagangan manusia merupakan kejahatan yang mencakup pada tindakan perekrutan, pemindahan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi (ILO, 2008). Menurut laporan *Global Slavery Index* (2022), *modern slavery* yang mencakup perdagangan manusia diperkirakan berdampak pada jutaan orang di seluruh dunia, dengan sekitar 29,3 juta orang berada dalam situasi perbudakan modern di wilayah Asia dan Pasifik, termasuk Asia Tenggara, sehingga menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu episentrum perdagangan manusia (Walk free, 2022).

Kawasan Asia Tenggara dalam sejarahnya merupakan jalur utama perdagangan manusia lintas batas karena kombinasi faktor mobilitas migran yang tinggi, ketimpangan ekonomi antarnegara, konflik politik, serta kelemahan pengawasan di perbatasan. Pada kawasan tersebut perdagangan manusia menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan dalam lima tahun terakhir, baik dari segi jumlah korban yang terdeteksi maupun kompleksitas pola kejahatannya. Dalam laporan *Global Report on Trafficking in Persons 2024*, UNODC (2024), mencatat bahwa kawasan Asia Timur dan Pasifik yang termasuk Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan deteksi korban yang konsisten. Deteksi tersebut khususnya untuk eksploitasi tenaga kerja dan bentuk eksploitasi baru seperti pemaksaan aktivitas kriminal dan kejahatan siber. Dalam bab awal laporan yang membahas gambaran global dan regional, bahwa perdagangan manusia di kawasan tersebut semakin bersifat lintas batas dan terhubung erat dengan arus migrasi regional serta kejahatan terorganisir transnasional (UNODC, 2024).

Fenomena perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara terus mengalami perkembangan, meskipun sudah ada berbagai upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pemerintah Regional melalui mekanisme *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) dan *ASEAN Regional Plan of Action* melawan kekerasan berbasis gender dan *trafficking*. ACTIP merupakan instrumen hukum regional yang disetujui oleh negara – negara di kawasan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, penindakan, pelaku, dan mekanisme kerja sama antarnegara anggota ASEAN. Studi dari artikel jurnal oleh (Trinova Lidia dan Wira Atman 2025) yang berjudul “Keamanan Kolektif Regional: Peran Aseanapol Dalam Penanganan Human Trafficking Di Asean”, menunjukkan bahwa implementasi dari ACTIP dan rencana aksi regional masih menghadapi tantangan karena disparitas kapasitas nasional, perbedaan regulasi antarnegara, serta kurangnya kerja sama teknis yang efektif. Perlu adanya keterlibatan lebih dari salah satu aktor negara yang kawasannya sangat strategis yaitu Thailand dalam upaya memperbaiki pertukaran informasi dan operasi bersama (Trinova dan Wira, 2025).

Dalam mengatasi perdagangan manusia UNODC (2024), menekankan bahwa perdagangan manusia tidak dapat dipahami oleh masyarakat secara luas sebagai fenomena nasional yang terpisah, tetapi sebagai jaringan regional maupun transnasional yang saling terhubung antara negara asal, transit, dan tujuan. Negara – negara yang berkontribusi sebagai negara dengan posisi geografis yang strategis dan arus migrasi tinggi memiliki peran penentu dalam keberhasilan ataupun kegagalan dalam upaya

penanggulangan kejahatan tersebut. Untuk konteks Asia Tenggara, Thailand merupakan negara yang memiliki peran tersebut dan secara khusus sering disebut oleh UNODC dalam laporannya sebagai negara yang terlibat langsung dalam dinamika tersebut, baik sebagai negara tujuan eksploitasi, jalur transit lintas batas, maupun pusat koordinasi penanganan dan repatriasi korban, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kerja paksa dan eksploitasi berbasis kejahatan siber di kawasan perbatasan (UNODC, 2024).

Thailand sendiri merupakan salah satu negara episentrum mobilitas manusia yang tinggi di Asia Tenggara, yang berada di tengah-tengah Asia Tenggara daratan yang menjadi pintu masuk utama dalam mobilitas perdagangan manusia, baik sebagai tujuan, akhir, tempat transit menuju negara lainnya di Asia Tenggara. Selain itu, daya tarik ekonomi Thailand yang lebih maju juga meningkatkan mobilitas manusia. Namun melalui mobilitas tersebut, migran dari negara tetangga yang mencari kesempatan kerja di sektor formal maupun informal sering dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk memanipulasi korban yang berujung pada kerja paksa, eksploitasi seksual, atau keterlibatan dalam kegiatan ilegal lainnya. Data dari *Global Slavery Index* (2023) memperkirakan bahwa di Thailand terdapat sekitar 401.000 orang hidup dalam kondisi *modern slavery*, dengan tingkat kerentanan relatif tinggi serta sejumlah kekurangan dalam perlindungan terhadap pekerja migran dan kelompok rentan lainnya (Walk Free, 2023). Oleh karena itu, keterlibatan aktif Thailand merupakan kunci utama atau simpul utama sebagai pusat regional utama yang secara langsung menentukan arah, skala, dan efektivitas pemberantasan perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara

Selain posisi yang strategis, Thailand juga mempunyai kapasitas dalam melakukan tindakan penegakan hukum, identifikasi, dan repatriasi korban. Tindakan – tindakan tersebut merupakan komponen penting sebagai pemutus jaringan perdagangan lintas batas. Dalam menangani kasus – kasus tersebut, Pemerintah Thailand juga melibatkan koordinasi antara aparat penegak hukum Thailand dengan organisasi non pemerintahan seperti ILO dan juga militer lokal dalam membebaskan korban. Strategi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dan keterlibatan aktif negara Thailand dalam setiap kebijakan *anti-trafficking* regional. Strategi tersebut terbukti melalui laporan berita dari Reuters bahwa pada Februari 2025, Thailand melakukan repatriasi dengan menerima 260 korban perdagangan manusia dari Myanmar yang dilakukan oleh militer dari Thailand (Reuters, 2025). Thailand sendiri juga telah mengambil berbagai kebijakan nasional untuk memperkuat respon tenaga hukumnya terhadap perdagangan manusia, termasuk mengadopsi berbagai strategi nasional yang komprehensif, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku, serta kersama bilateral dengan negara – negara di kawasan Mekong seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar. Organisasi *anti-trafficking* internasional seperti *United Nations Inter-Agency Project* (UNIAP).

Merujuk pada fenomena yang ada di wilayah regional Asia Tenggara, menunjukkan bahwa upaya menurunkan jumlah perdagangan manusia tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan Thailand. Peran negara tersebut sebagai jalur utama transit korban, tempat tujuan eksploitasi, serta pusat koordinasi respons hukum utama dan perlindungan menjadi faktor penting dalam setiap strategi regional. Selain itu, tantangan baru seperti perdagangan manusia di ranah digital yaitu untuk *forced criminality* melalui *scam centers* yang melibatkan jaringan lintas negara semakin memperkuat argumen bahwa Thailand menjadi simpul atau node strategis yang mempengaruhi arah, skala, dan efektivitas upaya pemberantasan perdagangan manusia di Asia Tenggara.

Dalam memahami dinamika perdagangan manusia di Asia Tenggara serta menjelaskan alasan Thailand memiliki posisi peran penentu dalam upaya penanggulangannya,

penelitian ini menggunakan teori *nodel governance* sebagai landasan analitik. Teori *nodel governance* memandang bahwa ancaman keamanan kontemporer yang bersifat lintas negara aktor tertentu atau wilayah tertentu berfungsi sebagai simpul (node) yang memiliki pengaruh struktural dibandingkan aktor lainnya, sehingga lebih berdampak langsung pada keseluruhan jaringan (Burris, et al, 2005). Karakteristik dari teori tersebut yaitu *mentalities*, *technologies*, *resources*, dan *institutions* penulis gunakan sebagai tolak ukur penempatan Thailand sebagai penentu utama dalam upaya penurunan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Melalui pendekatan tersebut juga, perdagangan manusia bukan sekadar persoalan kriminalitas, tetapi sebagai tantangan keamanan regional yang kompleks dan membutuhkan respons kolektif serta keterlibatan aktif negara-negara kunci, khususnya Thailand.

Dengan latar belakang empiris fenomena di kawasan Asia Tenggara analisis penelitian ini yaitu menjelaskan alasan Thailand sangat berperan sebagai simpul utama atau node dalam upaya penurunan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, penelitian ini mengeksplorasi secara mendalam keterlibatan Thailand melalui kerangka analisis teori *node governance* melalui tiga faktor utama yaitu : (1) Posisi geografis sebagai hub transit regional, (2) kekuatan ekonomi yang mendorong migrasi tenaga kerja dalam skala besar, dan (3) kapasitas hukum dan kelembagaan sebagai fondasi kepemimpinan kebijakan regional. Melalui pembahasan tersebut, penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi analitis terhadap pemahaman mengenai peran negara kunci atau simpul utama dalam penanganan kejahatan transnasional serta memperkaya diskursus kebijakan anti-perdagangan manusia di tingkat regional Asia Tenggara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara penjelasan deskriptif-analitis untuk menganalisis alasan yang menjadikan upaya penurunan perdagangan manusia di Asia Tenggara harus melibatkan Thailand sebagai aktor kunci regional. Pendekatan tersebut dipilih oleh penulis karena perdagangan manusia merupakan fenomena kejahatan transnasional yang kompleks, lintas batas. Data yang digunakan oleh penulis menggunakan data sekunder yang terkumpul melalui studi kepustakaan, meliputi artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir dan laporan resmi organisasi internasional dan regional seperti UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), IOM (*International Organization for Migration*), UN Women, ILO (*International Labor Organization*), UNM (*United Nations Migration Network*) dan dokumen kebijakan ASEAN, termasuk *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)*. Pemilihan sumber dilakukan oleh penulis secara relevansi, kredibilitas, dan keterkinian data. Analisis data dilakukan oleh penulis menggunakan analisis isi kualitatif, dengan fokus pada identifikasi tema-tema utama terkait peran Thailand sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan manusia, serta kontribusinya dalam kerangka kerja sama regional ASEAN.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris dari literatur dengan kerangka teori yang ada. Penelitian ini menggunakan teori *nodel governance* untuk menjelaskan posisi Thailand sebagai negara sentral dalam dinamika keamanan Asia Tenggara. Melalui analisis ini, penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk peran strategis Thailand dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia di tingkat regional. Penelitian ini dibatasi oleh penulis pada analisis peran Thailand dalam konteks regional Asia Tenggara dan tidak membahas secara mendalam studi kasus individual korban atau jaringan kriminal tertentu. Fokus utama diarahkan

pada dimensi kebijakan, kerja sama regional, dan posisi struktural Thailand dalam tata kelola keamanan kawasan.

Hasil dan Pembahasan

Thailand sebagai Pusat Aktivitas Lintas Batas Perdagangan Manusia di Asia Tenggara

Letak geografis Thailand yang strategis membuat Thailand memiliki banyak peran sekaligus yakni sebagai negara asal, transit, dan tujuan utama korban perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Posisi Thailand tersebut menyebabkan Thailand menjadi episentrum perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara, sehingga Thailand secara resmi mengesahkan undang-undang Anti-Trafficking in Persons (B.E. 2551) pada 2008. Kebijakan tersebut yang merupakan tonggak awal negara ini memperlakukan perdagangan manusia bukan sekadar tindak pidana biasa, tetapi sebagai masalah serius yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi korban (Ninsri, S, 2008). Dalam perspektif *nodal governance*, Thailand termasuk pada 2 karakteristik utama dalam perspektif teori *nodal governance* karena mengadopsi mentalitas keamanan manusia dan memiliki sumber daya negara yaitu wilayah strategis. Oleh karena itu, perlu analisis mendalam terhadap alasan peran Thailand sebagai simpul utama atau *regional hub* dalam dinamika perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara menjadi sangat penting (Burris, Drahos, & Shearing, C, 2005).

Secara geografis, Thailand menempati posisi di jantung Asia Tenggara daratan, yang memiliki jalur darat yang panjang dan relatif terbuka. Thailand berbatasan langsung dengan empat negara yakni Myanmar di sebelah barat dan barat laut dengan garis perbatasan sepanjang sekitar 2,416 kilometer, Laos di sebelah timur laut dan utara dengan perbatasan sepanjang 1,845 kilometer, Kamboja di sebelah tenggara dengan perbatasan sepanjang 817 kilometer, dan Malaysia di sebelah selatan dengan perbatasan sepanjang 595 kilometer. Menurut laporan dari UNODC pada tahun 2024, posisi tersebut menjadi kunci utama perdagangan manusia relatif lebih mudah di akses melalui jalur transit alami (UNODC, 2024).

Banyak area – area perbatasan Thailand dengan negara – negara tetangganya memiliki karakteristik topografi yang kompleks seperti terpencil, berbukit, dan tertutup hutan lebat, sehingga memungkinkan para pelaku kejahatan manusia beroperasi dengan relatif mudah tanpa terdeteksi oleh otoritas. Salah satu contohnya yaitu perbatasan Thailand-Myanmar yang merupakan perbatasan terpanjang, sebagian besar melewati wilayah pegunungan yang terjal, tertutup hutan lebat, dan sulit diakses oleh manusia. Melalui laporan tersebut juga, mencatat bahwa sebagian besar korban perdagangan manusia di Sub-Kawasan Mekong (GMS) pernah melewati wilayah Thailand, baik secara legal maupun ilegal, sebelum akhirnya para korban di eksploitasi oleh pelaku perdagangan manusia lebih lanjut (UNODC, 2024).

Wilayah perbatasan Thailand – Myanmar seperti Mae Sot, sebuah distrik di provinsi Tak, Thailand Barat Laut merupakan contoh nyata dari posisi geografis yang sangat dimanfaatkan oleh sindikat sebagai lintas batas pergerakannya. Mae Sot merupakan jalur utama perbatasan Thailand-Myanmar melalui *East–West Economic Corridor* dan telah dikenal oleh masyarakat sebagai *gateway* utama bagi perdagangan barang, migrasi informal, dan perdagangan manusia lintas batas. Kota tersebut memiliki komunitas besar migran dan pengungsi dari Myanmar yang juga sering terlibat dalam transaksi ekonomi serta jaringan migrasi legal maupun ilegal, sehingga pada akhirnya memunculkan kerentanan terhadap perdagangan manusia. Kondisi konflik dan

persekusi di Myanmar menyebabkan banyak migran tersebut akhirnya dibawa masuk ke Thailand melalui jalur-jalur pegunungan yang tersembunyi (Bangkok Post, 2024)

Wilayah perbatasan Thailand – Laos yang sebagian besar merupakan perairan Sungai Mekong juga menjadi tantangan yang unit dan sulit. Sungai Mekong yang penting dan berliku – liku menciptakan ratusan titik penyebaran potensial mulai dari *ferry* resmi hingga perahu-perahu kecil yang beroperasi secara ilegal. Provinsi-provinsi di timur laut Thailand seperti Nong Khai, Mukdahan, dan Ubon Ratchathani menjadi pintu masuk utama bagi korban dari Laos dan bmbahkan dari Vietnam yang transit melalui Laos. Karakteristik geografis wilayah tersebut, dengan komunitas yang memiliki ikatan etnis dan budaya lintas batas, memfasilitasi pergerakan orang dan mempersulit identifikasi korban perdagangan manusia dari migran reguler (UNODC, 2017).

Perbatasan Thailand – Kamboja di wilayah timur dan tenggara juga menjadi jalur penting dalam jaringan perdagangan manusia regional. Meskipun relatif lebih pendek dibandingkan perbatasan Myanmar dan Laos, wilayah tersebut signifikansi ekonomi yang tinggi dengan adanya zona ekonomi khusus perbatasan dan kawasan perbatasan yang ramai. Asian Development Bank (2021) menyoroti bahwa perkembangan ekonomi di wilayah perbatasan Thailand-Kamboja telah menarik ribuan pekerja migran, banyak di antaranya berada dalam situasi yang tidak lazim dan rentan terhadap eksploitasi (Asian Development Bank, 2021).

Melalui Laporan *Human Trafficking Search* (HRC) (2024), melaporkan bahwa kota lainnya merupakan rute – rute perdagangan manusia yakni yang Provinsi Sa Kaeo, Thailand tepatnya di pos pemeriksaan yang berbatasan langsung dengan kota Poipet di Kamboja. Kota tersebut merupakan titik persinggahan utama baik untuk perjalanan yang sah maupun perdagangan ilegal, karena pasar perbatasannya yang ramai dan zona kasinonya, yang dapat memberikan perlindungan bagi kegiatan ilegal. Provinsi Sa Kaeo dan Trat di Thailand juga menjadi titik masuk utama bagi pekerja migran Kamboja, dan sayangnya juga menjadi jalur perdagangan manusia. Kasino-kasino yang beroperasi di sisi Kamboja dari perbatasan juga telah menjadi lokasi eksploitasi bagi korban perdagangan manusia, termasuk untuk tujuan kerja paksa dan eksploitasi seksual. Rute-rute alami lainnya juga yang lebih kecil seperti Klong Ban Ta Joy di Aranyaprathet (Sa Kaeo), Ban Pak Kad di Pong Nam Ron (Chanthaburi), dan Non Mak Mun/Khok Sung di Sa Kaeo juga digunakan oleh pelaku jaringan perdagangan manusia karena mereka menghindari pengawasan ketat di pos perbatasan resmi dengan memilih rute yang lebih sulit diawasi oleh otoritas. (HRC, 2024).

Beberapa wilayah lain di Thailand juga menunjukkan hubungan dengan perdagangan manusia akibat posisi mereka di koridor ekonomi dan migrasi. Provinsi Sa Kaeo (Aranyaprathet, Khok Sung) memiliki rute ke Kamboja yang sering digunakan oleh sindikat kejahatan untuk perdagangan manusia dan barang ilegal, karena jalurnya yang relatif kurang diawasi oleh penegak hukum sehingga memungkinkan pelaku mengirimkan orang secara ilegal ke luar negeri. Perbatasan tersebut sangat berkaitan dengan perdagangan tenaga kerja murah yang kemudian berujung pada eksploitasi saat mereka dipindahkan oleh sindikat ke negara tujuan tertentu tanpa proteksi hukum yang memadai (HRC, 2024). Hal tersebut, menjelaskan alasan wilayah perbatasan tertentu di Thailand menjadi bagian penting dalam dinamika kriminal lintas negara.

Wilayah perbatasan Thailand tersebut juga menjadi penting karena berdasarkan fakta dari lapangan, modus operandi terbaru yaitu banyak korban yang direkrut oleh sindikat kejahatan perdagangan manusia dari negara asal dengan janji pekerjaan di Thailand, tetapi pada dasarnya mereka hanya transit di Thailand lalu dipindahkan oleh sindikat kejahatan ke negara lain. Selain sebagai jalur kejahatan, Pola tersebut menunjukkan

bahwa Thailand bukan hanya tempat lokasi kejadian, melainkan sebagai penghubung utama dalam rantai perdagangan dan juga penanggulangan korban perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara. Reuters (2024), melaporkan bahwa korban perdagangan manusia yang ditemukan di pusat eksploitasi di Myanmar dan Kamboja hampir selalu memiliki riwayat perjalanan melalui Thailand, baik sebagai tujuan awal maupun titik transit (Reuters, 2024).

Selain perbatasan darat, posisi geografis Thailand yang memiliki akses ke dua wilayah maritim penting yaitu Teluk Thailand di timur dan Laut Andaman di barat yang menambah kompleksitas perdagangan di negara tersebut. Garis pantai Thailand yang panjang, mencapai sekitar 3,219 kilometer, dengan ratusan pulau dan teluk yang tersebar, menciptakan tantangan pengawasan maritim yang signifikan. Walk Free Foundation dalam Global Slavery Index (2023), mengidentifikasi bahwa industri perikanan di perairan Thailand menjadi salah satu sektor dengan prevalensi kerja paksa tertinggi, di mana ribuan pekerja migran diperdagangkan ke kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Teluk Thailand dan Laut Andaman (Walk Free, 2023). Pelabuhan-pelabuhan perikanan seperti di Samut Sakhon, Ranong, dan Songkhla menjadi pintu masuk dan lokasi eksploitasi bagi korban perdagangan manusia maritim.

Wilayah selatan Thailand yang berbatasan dengan Malaysia memiliki karakteristik geografis dan demografis yang unik, dengan populasi mayoritas Muslim yang memiliki ikatan budaya dan keluarga lintas batas. Provinsi-provinsi seperti Narathiwat, Yala, Pattani, dan Songkhla di selatan menjadi jalur penting untuk pergerakan orang antara Thailand dan Malaysia. Meskipun terdapat pos pemeriksaan resmi, banyak jalur informal yang digunakan oleh komunitas lokal untuk melintasi perbatasan, dan jalur-jalur ini juga dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia. Korban – korban dari Myanmar, Bangladesh, dan bahkan dari Afrika yang masuk ke Thailand melalui perbatasan utara atau melalui bandara Bangkok sering kali dibawa pelaku ke selatan untuk kemudian diselundupkan ke Malaysia, kemudian dieksploitasi (UN Network on Migration in Thailand, 2024).

Dalam konteks tersebut, posisi geografis Thailand bukan hanya sekadar letak fisik semata, tetapi juga menempatkannya sebagai hub transit utama yang harus dilibatkan oleh ASEAN dalam strategi regional penanggulangan perdagangan manusia, karena jalur migrasi dan kriminalitas yang memanfaatkan poros tersebut tetap terbuka apabila Thailand tidak menjadi bagian inti dari kerja sama regional. Tanpa koordinasi yang kuat melalui Thailand, jaringan perdagangan manusia lintas negara dapat terus mengeksploitasi celah perbatasan dan memobilisasi korban melalui rute yang hampir mustahil dikendalikan oleh satu negara saja.

Melalui penjelasan – penjelasan perbatasan di Thailand tersebut, Thailand dapat dipahami sebagai node sentral dalam jaringan perdagangan manusia Asia Tenggara karena memenuhi Thailand telah memenuhi 2 karakteristik *nodal governance* yaitu *mentalities* dan *resources* atau sumber daya. Thailand memiliki mentalitas yang memandang perdagangan manusia sebagai persoalan lintas batas yang berpusat pada kerentanan migran di wilayah perbatasan dan pelabuhan. Mentalitas ini diwujudkan melalui teknologi berupa instrumen hukum, mekanisme identifikasi korban, serta koordinasi operasional di titik-titik lintas batas. Seluruh upaya tersebut didukung oleh sumber daya negara yakni letak geografis Thailand berperan penting dalam kerja sama internasional yang memungkinkan intervensi dilakukan secara konsisten dan berdampak luas (. Oleh karena itu, penurunan perdagangan manusia di Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari penguatan peran Thailand sebagai node kunci dalam tata kelola keamanan non-tradisional, karena perubahan kapasitas governance pada satu

simpul strategis ini berpotensi menghasilkan efek sistemik terhadap keseluruhan jaringan perdagangan manusia regional (Burris, Drahos, & Shearing, C, 2005).

Kekuatan Ekonomi Thailand yang Menarik Migrasi Tenaga Kerja Masif

Membahas ekonomi tidak dapat dipisahkan oleh keuntungan geografis Thailand yang berada di tengah kawasan sehingga akses perdagangan internasional lebih memudahkan Thailand. Melalui keuntungan tersebut, Thailand juga memiliki tingkat pembangunan ekonomi yang sangat variatif sehingga menciptakan gradien ekonomi yang kuat dalam mendorong migrasi. Keunggulan ekonomi Thailand melalui industrialisasi, urbanisasi, dan keterbukaan pasar tenaga kerja dalam beberapa dekade terakhir menjadikannya tujuan utama bagi para jutaan pekerja dari berbagai negara, khususnya negara – negara tetangga dan kawasan Asia Tenggara karena aksesnya yang mudah. Data terbaru menurut *The Migrant Population Network* (2025), menunjukkan bahwa Thailand masih menjadi tujuan signifikan bagi pekerja migran dengan jumlah pekerja migran yang terus tinggi lebih dari 3,6 juta pada 2025. Besarnya jumlah migran tersebut, menjadi bagian penting dari struktur pasar tenaga kerja Thailand sekaligus memberikan tantangan besar dalam upaya pencegahan perdagangan manusia.

Kekuatan ekonomi Thailand juga dapat terlihat dari keberhasilannya mempertahankan stabilitas dan daya tarik ekonomi bahkan di tengah krisis global seperti pandemi Covid-19. Ester Sophia Jayanti Simanjuntak, Adhiningasih Prabhawati, & Honest Dody Molasy (2025) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, Thailand mampu menjaga aktivitas ekonomi domestik serta konektivitas lintas negara melalui kebijakan pemulihan yang adaptif, khususnya pada sektor strategis seperti pariwisata, industri, dan jasa. Strategi pemerintah Thailand dalam pemulihan ekonomi selama pandemi menunjukkan kapasitas negara dalam mengelola krisis sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pusat kegiatan ekonomi di Asia Tenggara (Ester, et al, 2025). Ketahanan ekonomi tersebut secara tidak langsung tetap menjadikan Thailand sebagai tujuan utama migrasi tenaga kerja dari negara-negara tetangga, karena peluang kerja dan upah yang relatif lebih stabil dibandingkan kawasan sekitarnya. Kondisi tersebut memperkuat peran Thailand sebagai magnet migrasi tenaga kerja masif, yang di satu sisi menopang pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain meningkatkan kerentanan terhadap praktik perdagangan manusia lintas batas apabila tidak diimbangi dengan perlindungan dan regulasi ketenagakerjaan yang memadai.

Melalui kekuatan ekonomi Thailand hingga saat ini dan variatifnya pekerjaan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Thailand dibandingkan dengan negara – negara asal migran dan kawasan Asia Tenggara mendorong fenomena migrasi tenaga kerja masif di Thailand. Perbedaan tingkat upah dan kesempatan kerja membuat banyak orang dari wilayah pedesaan dan terpencil di negara – negara tetangga di perbatasan melihat Thailand menjadi negara tanah harapan. Hal tersebut terlihat dari jumlah pekerja migran yang terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir di Thailand. Menurut Supharerk O-in (2025), dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Monitoring the Immigration Situation of Migrant Workers in Thailand during the Years 2013 and 2023”, memaparkan tren peningkatan pekerja migran di Thailand dari 2013 ke 2023 dan menyebutkan bahwa sebagian besar pekerja migran adalah pekerja tidak terampil yang bekerja di sektor-sektor seperti manufaktur, konstruksi, dan pertanian. Sebagian dari mereka masuk melalui mekanisme formal dengan dokumen yang sah, namun tidak sedikit juga yang melalui jalur informal yang kurang teratur. Berada di Thailand memberikan harapan pendapatan yang lebih baik ketimbang di negara asalnya, sebuah realitas yang menjadi magnet kuat migrasi ekonomi regional (O-in, 2025).

Namun demikian, daya tarik kekuatan ekonomi Thailand ini sekaligus menciptakan kerentanan struktural bagi pekerja migran terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia. Ketika peluang pasar tenaga kerja besar disertai dengan kelemahan dalam perlindungan hukum bagi pekerja asing, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh jaringan kriminal dan penyelundup manusia untuk mengeksploitasi kerentanan pekerja tersebut. Migran yang tiba di Thailand tanpa dukungan dokumen atau melalui jalur informal sering kali berada di luar pengawasan kerja formal dan tanpa akses yang memadai terhadap hak-hak tenaga kerja atau jaminan sosial. Ketidakpastian status hukum tersebut membuat mereka tidak berdaya ketika harus menghadapi praktik perekrutan yang curang, pemotongan upah secara tidak sah, pembayaran yang sangat rendah, atau bahkan situasi kerja yang memenuhi indikator perdagangan manusia seperti paksaan kerja dan perbudakan modern (European Union, 2024).

Kekuatan ekonomi Thailand yang menarik migran tenaga kerja juga berdampak pada hubungan pemerintahan antarnegara di Asia Tenggara. Thailand sebagai negara tujuan utama migran bertanggung jawab untuk menciptakan sistem migrasi yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga menghormati hak asasi manusia dan mitigasi risiko perdagangan manusia. Tanpa upaya bersama antara Thailand dan negara asal migran, termasuk lewat kerjasama bilateral dan regional, upaya menanggulangi perdagangan manusia akan tetap kurang efektif. Hal ini membutuhkan koordinasi kebijakan, mekanisme perlindungan yang konsisten, serta standar regulasi ketenagakerjaan yang kuat di seluruh ASEAN agar migrasi tenaga kerja dapat berlangsung secara aman, legal, dan produktif bagi semua pihak.

Melalui penjelasan kekuatan ekonomi Thailand yang menarik tenaga kerja masih tersebut, penulis menganalisis bahwa faktor kedua tersebut merupakan faktor yang memperkuat posisi Thailand sebagai node utama menurut kerangka *nodal governance*, terutama melalui hubungan antara *mentalities*, *resources*, dan *institutions*. Pertama, dalam kerangka *mentalities*, Burris dkk. menjelaskan bahwa setiap node memiliki cara berpikir yang membentuk suatu masalah didefinisikan dan aktor lain memosisikan diri terhadap node tersebut. Dalam konteks tersebut, kekuatan ekonomi suatu wilayah membentuk *shared mentalities* di antara aktor jaringan, termasuk migran, perekrut tenaga kerja, dan pelaku ekonomi, bahwa wilayah tersebut merupakan ruang peluang dan akses ekonomi (Burris et al., 2005). Dengan demikian, arus migrasi yang mengarah ke Thailand bukan sekadar fenomena ekonomi, tetapi juga refleksi dari mentalitas kolektif yang mengonstruksi Thailand sebagai pusat aktivitas regional.

Kedua, teori *nodal governance* secara eksplisit menempatkan *resources* sebagai elemen kunci yang menentukan daya tarik dan kapasitas node. Burris dkk. menegaskan bahwa node dengan konsentrasi sumber daya baik material maupun simbolik, menarik lebih banyak aktor dan interaksi ke dalam jaringannya. Dalam kerangka ini, kekuatan ekonomi dan permintaan tenaga kerja berfungsi sebagai *structural resources* yang mengonsentrasikan arus manusia, modal, dan jaringan perekrutan pada satu simpul, sehingga memperkuat posisi node tersebut dalam sistem tertentu (Burris et al., 2005). Dengan demikian, permintaan tinggi terhadap tenaga kerja murah di sektor perikanan, manufaktur, konstruksi, dan jasa menciptakan daya tarik struktural yang mengonsentrasikan arus manusia di wilayah Thailand. Konsentrasi sumber daya ekonomi ini menjadikan Thailand titik temu antara kepentingan pasar tenaga kerja, migrasi, dan jaringan perekrutan, baik formal maupun informal, yang meningkatkan intensitas interaksi dalam jaringan regional.

Ketiga, *nodal governance* menekankan bahwa arus dan interaksi yang terkonsentrasi pada suatu node selalu dimediasi oleh institusi, yaitu struktur formal maupun informal

yang memungkinkan mobilisasi mentalitas dan sumber daya secara berkelanjutan. Burris dkk. menyatakan bahwa tanpa institusi, sebuah node tidak dapat mempertahankan pengaruhnya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, arus migrasi tenaga kerja yang ditarik oleh kekuatan ekonomi hanya menjadi signifikan secara tata kelola ketika diatur melalui kebijakan, regulasi, dan mekanisme administratif yang membentuk hasil konkret—baik perlindungan maupun kerentanan (Burris et al., 2005). Institusi-institusi ini menentukan apakah kekuatan ekonomi Thailand berfungsi sebagai mekanisme perlindungan atau justru menciptakan kerentanan terhadap eksploitasi. Dengan demikian, ekonomi Thailand tidak berdiri terpisah, tetapi terintegrasi dalam struktur kelembagaan yang membentuk hasil tata kelola.

Secara keseluruhan, kekuatan ekonomi Thailand menjadikannya sebagai node yang sangat menarik dan padat interaksi dalam jaringan migrasi dan perdagangan manusia Asia Tenggara. Karena arus migrasi dan aktivitas ekonomi terkonsentrasi pada satu simpul ini, setiap perubahan dalam kapasitas tata kelola Thailand baik penguatan maupun pelemahan berdampak langsung pada dinamika dan hasil jaringan eksploitasi tenaga kerja di tingkat regional. Oleh karena itu, faktor kekuatan ekonomi Thailand yang mengundang migrasi tenaga kerja masih menjadi relevan keberhasilan upaya penurunan *human trafficking* di Asia Tenggara sangat bergantung pada kapasitas Thailand untuk mengelola, mengoordinasikan, dan mengintervensi dinamika migrasi tenaga kerja yang ditarik oleh kekuatannya sendiri.

Kapasitas Hukum dan Kelembagaan sebagai Fondasi Kepemimpinan Kebijakan Regional

Faktor ketiga menjadikan Thailand sangat berperan penting dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara adalah kapasitas hukum dan kelembagaan Thailand sebagai fondasi kepemimpinan kebijakan di kawasan Asia Tenggara. Kapasitas hukum Thailand sendiri berawal dari undang-undang domestik yang didesain untuk mengatur pencegahan, penegakan, dan perlindungan korban. Dasar hukum tersebut yaitu Dasar hukum utama yaitu Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (2008) (*ATIPA*), yang telah diselaraskan dengan standar internasional seperti Protokol Palermo (Ninsri, S, 2008). Dari sisi mentalities, dalam kerangka *nodel governance*, kerangka hukum Thailand mencerminkan cara pandang negara terhadap perdagangan manusia sebagai masalah sistemik lintas negara yang membutuhkan respons terkoordinasi. Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa Thailand memahami perdagangan manusia bukan sekadar pelanggaran hukum domestik, melainkan ancaman yang terhubung dengan dinamika migrasi regional dan ekonomi lintas batas (Burris et al., 2005).

Mentalitas tersebut kemudian diwujudkan melalui *technologies*, yaitu instrumen dan mekanisme konkret yang digunakan oleh Thailand untuk mengatur dan memengaruhi jaringan perdagangan manusia. Undang-undang anti-trafficking Thailand tidak hanya menetapkan sanksi pidana, tetapi juga menciptakan mekanisme koordinasi nasional, prosedur identifikasi korban, serta kerja sama internasional. Thailand bersama negara lain di ASEAN berkomitmen melaksanakan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* sebagai dasar kerangka hukum regional yang mengikat untuk pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban. Thailand secara aktif mengimplementasikan ACTIP sebagai bagian dari agenda nasionalnya, yang menunjukkan kepatuhan pada standar hukum regional sekaligus memperkuat kerangka kelembagaan untuk kerja sama lintas negara (Safiinattunnajah dan Saraswati, 2025).

Karakteristik lainnya yaitu, *resources* yang dimiliki oleh Thailand sebagai node menjadikannya sangat berperan penting dalam koordinasi hukum dan kelembagaan di wilayah regional. Sumber daya yang dimiliki oleh Thailand tidak hanya berupa keuntungan alamnya atau geografisnya, anggaran negara, dan aparat penegak hukum, tetapi juga keahlian institusional, akses terhadap kerja sama internasional, dan legitimasi politik di tingkat ASEAN. Laporan-laporan resmi menunjukkan bahwa Thailand memiliki infrastruktur kelembagaan dan kapasitas administratif yang relatif lebih berkembang untuk menangani perdagangan manusia dibandingkan banyak negara tetangga. Dalam kerangka *nodal governance*, konsentrasi sumber daya pada satu node meningkatkan daya tarik dan pengaruh node tersebut dalam jaringan, serta menciptakan dampak yang tidak proporsional terhadap hasil sistemik yang menjadikan negara tersebut memiliki peran penting dalam suatu jaringan. Oleh karena itu, kapasitas hukum dan kelembagaan Thailand sebagai negara node utama menjadi sangat penting perannya dalam memberantas perdagangan manusia di jaringan kawasan Asia Tenggara.

Selain itu dimensi *institutions*, yang merupakan karakteristik node Thailand menjadi elemen kunci yang menjelaskan juga mengapa kapasitas hukum dan kelembagaan Thailand berfungsi sebagai fondasi kepemimpinan kebijakan regional. Thailand membangun struktur kelembagaan yang relatif stabil dan berkelanjutan melalui komite nasional, mekanisme lintas kementerian, serta hubungan formal dengan organisasi internasional. Salah satu manifestasi paling jelas dari kapasitas institusional ini adalah Thailand menjadi tuan rumah dan penginisiasi lembaga pelatihan *Counter Trafficking in Persons Centre of Excellence* (CTIP COE) dalam fasilitas pelatihan pertama di ASEAN khusus untuk memperkuat kapasitas profesional dalam menangani berbagai bentuk perdagangan manusia dengan pendekatan komprehensif. Pendirian CTIP COE memperlihatkan bahwa kapasitas kelembagaan Thailand tidak hanya berorientasi domestik, tetapi juga mengembangkan standar dan dukungan kapasitas bagi negara lain di Asia Tenggara. Inisiatif tersebut merupakan bentuk kepemimpinan kebijakan yang mendorong harmonisasi penanganan terhadap *human trafficking* di tingkat regional (CTIP COE, 2023).

Selain itu, kelembagaan Thailand juga memiliki unit khusus di kepolisian dan kejaksaan yang menangani kasus perdagangan manusia, serta mekanisme rujukan nasional (*National Referral Mechanism/NRM*) yang relatif mapan. Mekanisme tersebut memungkinkan korban untuk diidentifikasi oleh otoritas Thailand sebagai korban perdagangan manusia, bukan sebagai pelanggar imigrasi. Dalam laporan *Royal Thai Government Country Report on Anti-Human* milik Thailand pada tahun (2024), melakukan 1.757 inspeksi dan penyaringan tenaga kerja di tempat usaha berisiko tinggi sesuai dengan SOP, menyaring dan melindungi hak hukum dari 86.753 pekerja, dengan calon korban dirujuk ke NRM untuk bantuan lebih lanjut. Peran kepemimpinan Thailand juga tercermin dalam praktik ASEAN. Banyak inisiatif ASEAN terkait perdagangan manusia, baik dalam bentuk pertemuan teknis, pelatihan aparat, maupun operasi bersama yang melibatkan Thailand sebagai tuan rumah atau koordinator. *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) mencatat bahwa Thailand secara rutin menjadi titik temu kerja sama antara negara sumber dan negara tujuan korban (AICHR, 2022).

Thailand juga berperan sebagai negara repatriasi, ribuan korban dari berbagai negara dibantu oleh Pemerintah Thailand untuk memulangkan korban yang selamat. Salah satu contohnya yaitu pada Maret 2025 sebanyak 554 WNI terduga korban perdagangan manusia *online scam* melalui Thailand. Masih banyak warga negara lainnya seperti

China, India, Ethiopia, Malaysia, dan Khazakstan yang dikembalikan oleh Pemerintah Myanmar melalui Thailand. Banyak korban diawasi oleh otoritas Thailand untuk melalui proses pengecekan status korban dan hukum lainnya (KP2MI, 2025). Pola tersebut menunjukkan bahwa Thailand bukan hanya tempat lokasi kejadian, melainkan sebagai penghubung utama dalam rantai perdagangan dan juga penanggulangan korban perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa Thailand telah menjadi gerbang utama penanganan korban lintas negara, bahkan ketika kejahatan terjadi di luar wilayah kedaulatannya. Negara-negara sumber korban sering kali tidak memiliki kapasitas atau akses langsung ke korban, sehingga Thailand menjadi aktor perantara yang tak tergantikan. *International Organization for Migration* (IOM) menegaskan bahwa sebagian besar mekanisme repatriasi korban *trafficking* di kawasan Mekong bergantung pada sistem rujukan nasional Thailand (IOM, 2023). Laporan lainnya oleh Saksornchai, J., & Wu, H. (2025), menunjukkan bahwa lebih dari 7.000 orang yang diselamatkan oleh pihak Thailand dari “*scam centers*” di Myanmar menunggu proses repatriasi melalui Thailand sebagai pusat koordinasi logistik dan kemanusiaan di Kawasan.

Thailand juga telah menjadi pusat koordinasi untuk kerja sama antarnegara dalam menanggulangi *human trafficking* dan kejahatan lintas batas terkait, khususnya melalui kerjasama bilateral dan regional. Pada awal 2025, Thailand dan China menyetujui pembentukan pusat koordinasi bersama untuk melawan jaringan *scam call centers* ilegal di sepanjang perbatasan Thailand dengan Myanmar dan Kamboja, yang seringkali dijalankan oleh pekerja yang ditransfer dengan modus perdagangan manusia. Pusat tersebut direncanakan berada di kantor polisi nasional Thailand di Bangkok dengan cabang operasional di Mae Sot, menegaskan peran strategis kota tersebut dalam upaya penegakan hukum transnasional. Kerja sama tersebut penting karena jaringan penipuan dan perdagangan manusia lintas negara tidak mengenal batas administratif nasional. Kolaborasi intelijen, strategi penutupan jaringan penipuan, dan pertukaran data profil korban antara negara seperti Thailand dan China menunjukkan bahwa penanganan *human trafficking modern* membutuhkan pendekatan yang jauh lebih luas dari sekadar hukum pidana nasional. Hal tersebut merupakan strategi keamanan regional yang perlu dukungan negara – negara tetangga (Hepgumpanat, P., & Wongcha-um, P, 2025).

Selain kerja sama regional yang Thailand buat untuk berperan penting penaggulangi hal tersebut, Thailand juga mendukung dan menjadi lokasi basis operasional sejumlah organisasi internasional yang memerangi *human trafficking*. Contohnya adalah *International Organization for Migration* (IOM) Thailand, yang aktif menangani kasus perbatasan Thailand – Myanmar dengan program seperti *The Promise II*, yang bertujuan membantu pekerja migran memperoleh keterampilan dan kualifikasi yang layak dan mengurangi kerentanan terhadap *trafficking*. IOM Thailand juga terlibat dalam forum internasional seperti *Bali Process* dan *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking* (COMMIT Process) untuk frustrasi kriminal tersebut melalui strategi *4P* (*prevention, protection, prosecution, partnership*) (Indarto, 2023). Melalui peran IOM yang ada di wilayah Thailand tersebut menunjukan bahwa Thailand menjadi “arena” internasional di mana pihak negara maju dan organisasi multilateral berkumpul untuk mengedepankan kebijakan terkoordinasi, pelatihan penegak hukum, dan perlindungan korban. Hal tersebut juga menambah bukti bahwa Thailand tidak hanya menanggung beban dari kejahatan *trafficking* secara geografis, tetapi juga memainkan peran aktif dalam kerja sama internasional untuk mengatasi persoalan ini.

Molasy (2025) menyoroti bahwa perdagangan manusia di kawasan kerap terjadi dalam konteks migrasi tenaga kerja yang tidak terkelola secara optimal, terutama ketika

mekanisme perlindungan hukum dan kebijakan ketenagakerjaan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pendekatan pencegahan. Eksploitasi kerap terjadi di sektor-sektor ekonomi yang sangat bergantung pada tenaga kerja migran, khususnya ketika proses migrasi tidak diiringi dengan perlindungan hukum dan kebijakan ketenagakerjaan yang memadai. Molasy juga menjelaskan bahwa kerangka hukum tersebut tidak hanya berorientasi pada kriminalisasi pelaku, tetapi juga mencakup mekanisme perlindungan korban dan koordinasi lintas lembaga, sehingga memperlihatkan kapasitas hukum Thailand dalam membangun respons yang lebih komprehensif dan terstruktur. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, Molasy menekankan bahwa keberadaan instrumen hukum tersebut memberikan fondasi normatif yang kuat bagi Thailand untuk berperan aktif dalam kerja sama regional dan memengaruhi arah kebijakan penanggulangan perdagangan manusia di Asia Tenggara.

Dengan demikian, kapasitas hukum dan kelembagaan Thailand tidak hanya menjelaskan kemampuan negara tersebut menangani perdagangan manusia di dalam negeri, tetapi juga menjelaskan kepemimpinan kebijakan regionalnya. Dalam kerangka *nodal governance*, Thailand berfungsi sebagai *node kunci* yang mengonsentrasikan arus migrasi, sumber daya, dan intervensi kebijakan. Karena banyak jalur perdagangan manusia regional beririsan di wilayah dan institusi Thailand, penguatan atau pelemahan kapasitas hukum dan kelembagaan di node tersebut memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan atau kegagalan upaya penurunan *human trafficking* di Asia Tenggara. Oleh karena itu, peran utama Thailand dalam upaya tersebut dapat dipahami memiliki peranan sangat penting sebagai konsekuensi logis dari posisinya sebagai node strategis dengan kapasitas tata kelola yang relatif kuat.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Thailand memiliki peran yang sangat penting dan tidak tergantikan dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Melalui perspektif *nodal governance*, Thailand dapat dipahami sebagai simpul utama (*key node*) dalam jaringan perdagangan manusia regional karena konsentrasi arus migrasi, jalur transit lintas batas, dan aktivitas ekonomi yang berpusat di wilayahnya. Posisi geografis Thailand di jantung Asia Tenggara daratan menjadikannya titik temu antara negara asal, transit, dan tujuan korban, sehingga setiap dinamika perdagangan manusia di kawasan hampir selalu melibatkan Thailand secara langsung maupun tidak langsung.

Selain faktor geografis, kekuatan dan ketahanan ekonomi Thailand secara signifikan menarik migrasi tenaga kerja dalam skala besar dari negara-negara tetangga. Arus migrasi ini memperkuat peran Thailand sebagai pusat pasar tenaga kerja regional, namun sekaligus menciptakan kerentanan struktural terhadap eksploitasi apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, Thailand tidak hanya menjadi lokasi terjadinya risiko perdagangan manusia, tetapi juga menjadi aktor kunci yang menentukan apakah migrasi tenaga kerja di kawasan berlangsung secara aman atau justru dimanfaatkan oleh jaringan kriminal lintas negara.

Lebih lanjut, kapasitas hukum dan kelembagaan Thailand memberikan dasar yang kuat bagi kepemimpinannya dalam kebijakan anti-perdagangan manusia di tingkat regional. Peran aktif Thailand dalam penegakan hukum, koordinasi lintas negara, identifikasi dan repatriasi korban, serta kerja sama dengan ASEAN dan organisasi internasional menunjukkan bahwa efektivitas upaya penurunan perdagangan manusia di Asia Tenggara sangat bergantung pada keterlibatan Thailand. Tanpa peran sentral Thailand

sebagai node strategis, kebijakan regional cenderung terfragmentasi dan tidak mampu menjangkau keseluruhan jaringan perdagangan manusia yang bersifat lintas batas. strategis menjadikan Thailand memiliki pengaruh sistemik terhadap efektivitas upaya penurunan perdagangan manusia di Asia Tenggara.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan upaya pemberantasan perdagangan manusia di Asia Tenggara sangat bergantung pada keterlibatan aktif dan penguatan kapasitas Thailand sebagai node kunci regional. Tanpa peran Thailand yang kuat dan terkoordinasi, kebijakan regional seperti ACTIP berpotensi tetap terfragmentasi dan kurang efektif. Oleh karena itu, penguatan kerja sama regional, harmonisasi kebijakan migrasi dan ketenagakerjaan, serta peningkatan kapasitas hukum dan kelembagaan Thailand menjadi prasyarat penting bagi terciptanya tata kelola keamanan non-tradisional yang lebih efektif dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Daftar Pustaka

- AICHR convenes human rights consultation with national task forces on countering trafficking in persons in ASEAN. (2022, October 7). AICHR. <https://aichr.org/news/aichr-convenes-human-rights-consultation-with-national-task-forces-on-countering-trafficking-in-persons-in-asean/>
- Asian Development Outlook (ADO) 2021: Financing a Green and Inclusive Recovery. (2023, October 3). Asian Development Bank. <https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-2021>
- Bangkok Post. (2024, November 24). Mae Sot's sour trafficking record. <https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2907696/mae-sots-sour-trafficking-record#:~:text=Mae%20Sot%2C%20a%20town%20on,forced%20to%20scam%20people%20worldwide.>
- Burris, S., Drahos, P., & Shearing, C. (2005). Nodal governance. *Australian Journal of Legal Philosophy*, 30-58. <https://ssrn.com/abstract=760928>
- Counter Trafficking in Persons Centre of Excellence (CTIP COE). (2023). *Counter trafficking in persons centre of excellence*. Orange Technology Solution Co.,Ltd. <https://ctipcoe.moj.go.th/aboutCtip>
- European Union. (2024). *New EU-UN 'PROTECT' project supports women migrant workers and children in Southeast Asia*. EEAS. https://www.eeas.europa.eu/delegations/thailand/new-eu-un-%E2%80%98protect%E2%80%99-project-supports-women-migrant-workers-and-children-southeast-asia_en
- Indarto, I. (2023). PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) THAILAND DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PERBATASAN THAILAND-MYANMAR TAHUN 2022. *TRANSBORDERS International Relations Journal*, 6(2), 23-36. <https://doi.org/10.23969/transborders.v6i2.10356>
- International Organization for Migration. (2023). Annual Report IOM Thailand 2023. In *Thailand*. International Organization for Migration (IOM). <https://thailand.un.org/en/267592-iom-thailand-annual-report-2023>

- Keamanan kolektif regional: Peran Aseanapol dalam penanganan human trafficking di ASEAN. (2025). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 6 Agustus 2025, Hal. 739-749.
<https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/citationstylelanguage/get/ieee?submissionId=5282&publicationId=4802&issueId=110>
- Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Indonesia (KP2MI). (2025). *Pemerintah Pulangkan 554 WNI Korban Online Scam di Myanmar, Menteri Karding Beri pendampingan dan Reintegrasi Sosial*. KP2MI. https://kp2mi.go.id/berita-detail/pemerintah-pulangkan-554-wni-korban-online-scam-di-myanmar-menteri-karding-beri-pendampingan-dan-reintegrasi-sosial?utm_source=chatgpt.com
- Labor Migration in Asia: Trends, Skills Certification, and Seasonal Work. (2024). In *Asian Development Bank Institute eBooks*. <https://doi.org/10.56506/xlct8213>
- Modern slavery in Asia and the Pacific*. (2023). Walk Free. <https://www.walkfree.org/global-slavery-index/findings/regional-findings/asia-and-the-pacific/>
- Molasy, H. D. (2025). Instrumen Hukum dalam mendorong pembangunan Internasional: Studi kasus penanggulangan perdagangan manusia di Thailand. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025, 257–271. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sWhF_MoAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=sWhF_MoAAAAJ:q3oQS_FYPqjQC
- New UNODC report sheds light on the phenomenon of human trafficking into Thailand*. (2017). United Nations: Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2017/August/new-unodc-report-sheds-light-on-the-phenomenon-of-human-trafficking-into-thailand.html?utm_source=chatgpt.com
- Ninsri, S. (2008, December 19). *Thailand's Anti-Trafficking In Persons Act B.E. 2551 (2008): A New development in Human Rights Protection and Justice*. <https://openjournals.utoledo.edu/index.php/infactispax/article/view/1127>
- O-In, S. (2025). Monitoring the immigration situation of migrant workers in Thailand during the years 2013 and 2023. *Journal of Arts and Thai Studies*, Vol.47No.1January –April 2025. <https://doi.org/10.69598/artssu.2025.3988>
- Overview of Thailand's Migrant workers in 2025 surpasses 3.6 million, but core issues remain unresolved*. (2025). MyWebSite. <https://en.thairath.co.th/scoop/interview/2902997>
- Responses to trafficking in persons for forced criminality in the Thai context - Human trafficking search*. (2024). Human Trafficking Search. <https://humantraffickingsearch.org/resource/responses-to-trafficking-in-persons-for-forced-criminality-in-the-thai-context/>
- Royal Thai Government. (2024). Royal Thai Government's country report on Anti-Human Trafficking efforts. In *Thailand Anti-Human Trafficking Efforts*. <https://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/country-reports/>

- Safiinatunnajah, H., & Saraswati, D. P. (2025). Thailand's Compliance in 2017-2022 with the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. *jurnal.upnyk.ac.id*. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v17i1.13190>
- Saksornchai, J., & Wu, H. (2025, February 27). *Over 7,000 workers from scam centers in Myanmar are awaiting repatriation after a regional crackdown* | AP News. AP News. <https://apnews.com/article/thailand-myanmar-online-scam-centers-repatriation-133efbf0529fafacf91a4aee27d48a87>
- Southeast Asia Human trafficking now a global crisis, Interpol says*. (2024, March 28). https://www.reuters.com/world/asia-pacific/southeast-asia-human-trafficking-now-global-crisis-interpol-says-2024-03-27/?utm_source=chatgpt.com
- Thailand receives 260 victims of human trafficking from Myanmar, army says*. (2025, February 13). Reuters; Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thailand-receives-260-victims-human-trafficking-myanmar-army-says-2025-02-13/?utm_source=chatgpt.com
- Thepgumpanat, P., & Wongcha-um, P. (2025). *Thailand and China to set up coordination centre to combat scam call networks*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thailand-china-set-up-coordination-centre-combat-scam-call-networks-2025-01-24/>
- United Nation Thailand & International Organization for Migration. (2024). THAILAND MIGRATION REPORT 2024. In *United Nation Thailand*. United Nations Thailand and International Organization for Migration. <https://thailand.un.org/en/285915-thailand-migration-report-2024>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024, December). *Global Report on Trafficking in Persons 2024*. United Nations: Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html>